





BAB 2

KINERJA DAN PROSPEK EKONOMI NASIONAL: PROSES PEMULIHAN TERUS BERLANGSUNG, STABILITAS TERJAGA

Proses pemulihan perekonomian Indonesia pada tahun 2021 dipengaruhi oleh perkembangan pandemi Covid-19. Perbaikan ekonomi yang berlangsung sejak triwulan I 2021 terus berlanjut meski sempat tertahan oleh merebaknya Covid-19 varian Delta pada triwulan III 2021. Secara keseluruhan tahun 2021, ekonomi Indonesia diperkirakan membaik dan akan tumbuh lebih tinggi lagi pada 2022, disertai dengan nilai tukar yang stabil dan inflasi yang terkendali. Perbaikan kondisi ekonomi tersebut didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sehubungan dengan semakin terkendalinya penyebaran Covid-19 dan adanya akselerasi vaksinasi. Pembukaan sektor-sektor ekonomi yang lebih luas, stimulus kebijakan yang berlanjut, dan tetap kuatnya kinerja ekspor juga menunjang prakiraan tersebut. Untuk itu, sinergi dan inovasi kebijakan ekonomi nasional perlu terus diperkuat untuk mendukung berlanjutnya proses pemulihan ekonomi ke depan.

Proses pemulihan perekonomian Indonesia pada tahun 2021 dipengaruhi oleh perkembangan pandemi Covid-19. Penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia pada tahun 2021 mengalami akselerasi dengan puncaknya mencapai lebih dari 50 ribu kasus per hari pada pertengahan Juli 2021 yang disebabkan oleh merebaknya varian Delta yang jauh lebih menular. Lonjakan kasus akibat varian Delta pada bulan Juli 2021 mendorong Pemerintah untuk mengimplementasikan penguatan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang diikuti dengan PPKM berdasarkan level keketatan yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Selain melalui pembatasan kegiatan masyarakat, Pemerintah juga mengimplementasikan program vaksinasi Covid-19 yang telah dilaksanakan sejak awal tahun 2021 dengan target cakupan 208 juta penduduk. Pertambahan kasus Covid-19 terkendali seiring implementasi kebijakan penanggulangan pandemi. Memasuki bulan Agustus, pertambahan kasus baru terus menunjukkan tren penurunan yang berlanjut yang diiringi dengan penurunan *positivity rate* dan *bed occupancy ratio*. Perkembangan positif tersebut memungkinkan Pemerintah untuk mengurangi intensitas kebijakan restriksi mobilitas sehingga aktivitas masyarakat kembali meningkat.

Perbaikan ekonomi domestik berlangsung pada semester I 2021, sedikit tertahan pada triwulan III 2021 akibat merebaknya Covid-19 varian Delta. Perekonomian Indonesia pada triwulan II 2021 mencatat pertumbuhan positif untuk pertama kali sejak merebaknya pandemi pada awal tahun sebelumnya. Kinerja positif tersebut terutama didorong oleh kinerja ekspor, realisasi belanja fiskal, serta investasi nonbangunan. Sementara itu, perbaikan konsumsi rumah tangga masih terbatas dipengaruhi oleh masih terbatasnya mobilitas masyarakat sejalan dengan pengendalian Covid-19. Namun, merebaknya Covid-19 varian Delta pada triwulan III 2021 menahan proses pemulihan ekonomi Indonesia. Kebijakan pembatasan mobilitas yang ditempuh untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 berdampak pada ekonomi, khususnya permintaan domestik. Dari sisi ketahanan eksternal, perbaikan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) berlanjut sejalan

dengan makin kuatnya kinerja ekspor. Transaksi berjalan pada triwulan III 2021 mencatat surplus sebesar 4,5 miliar dolar AS yang dikontribusikan oleh perbaikan kinerja neraca perdagangan. Sementara itu, surplus transaksi modal dan finansial pada triwulan III 2021 juga lebih tinggi di tengah peningkatan kasus Covid-19 dan kekhawatiran pengetatan kebijakan moneter global yang lebih cepat sejalan tren kenaikan inflasi dunia. Sejalan dengan kinerja NPI yang baik, nilai tukar Rupiah relatif terjaga dengan volatilitas yang rendah didukung oleh persepsi positif terhadap ekonomi domestik serta kebijakan stabilisasi nilai tukar Bank Indonesia. Sementara itu, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan tingkat inflasi yang rendah dipengaruhi permintaan yang masih terbatas. Stabilitas Sistem Keuangan tetap terjaga dan transaksi ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh di tengah penyebaran Covid-19 varian Delta.

Kinerja perekonomian diperkirakan membaik pada triwulan IV 2021. Prakiraan tersebut akan membawa perekonomian untuk keseluruhan tahun 2021 lebih baik dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Perbaikan tersebut didukung oleh mobilitas yang terus meningkat, pembukaan sektor-sektor ekonomi yang lebih luas, stimulus kebijakan yang berlanjut, dan tetap kuatnya kinerja ekspor. Kinerja ekspor yang baik menjaga kinerja NPI di tengah ketidakpastian di pasar keuangan global yang meningkat. Nilai tukar Rupiah pada 2021 secara keseluruhan terjaga stabil sesuai dengan fundamental. Stabilitas tersebut ditopang oleh kecukupan pasokan valas yang berasal dari residen dan nonresiden, serta ketersediaan instrumen lindung nilai. Inflasi tetap rendah hingga akhir tahun 2021 dipengaruhi oleh tertahannya permintaan domestik. Selain itu, memadainya pasokan untuk merespons permintaan, serta sinergi kebijakan yang konsisten antara Bank Indonesia dan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menjaga kestabilan harga juga berkontribusi kepada tetap terkendalinya pergerakan harga. Stabilitas sistem keuangan, kinerja perbankan, dan pertumbuhan kredit semakin menguat sejalan dengan terkendalinya penyebaran Covid-19. Selain itu, dengan kinerja ekonomi yang semakin baik serta didukung program digitalisasi sistem pembayaran, transaksi sistem pembayaran diperkirakan terus meningkat.

Perbaikan perekonomian diperkirakan berlanjut pada 2022. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat sejalan dengan akselerasi konsumsi swasta dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor, meski dibayangi risiko kenaikan kasus Covid-19. Keseimbangan eksternal 2022 diperkirakan terjaga terutama didorong kinerja transaksi modal dan finansial yang diperkirakan masih dapat membiayai defisit transaksi berjalan. Sejalan dengan prakiraan kinerja permintaan domestik yang membaik, inflasi pada 2022 diperkirakan meningkat namun tetap terkendali dalam sasaran $3\pm 1\%$ dengan intermediasi perbankan diperkirakan semakin membaik dan stabilitas keuangan yang tetap terjaga.

Sinergi dan inovasi kebijakan nasional dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan mendorong perbaikan ekonomi nasional. Sinergi untuk

"Perbaikan perekonomian diperkirakan berlanjut pada 2022"

akselerasi vaksinasi dan penanganan Covid-19 dengan pembukaan sektor prioritas perlu terus diperkuat untuk semakin mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, diperlukan sinergi penguatan bauran kebijakan ekonomi nasional untuk menjaga stabilitas dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah prospek berlanjutnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Strategi ini perlu diperkuat dengan inovasi, baik dalam sinergi kebijakan ekonomi nasional maupun dalam akselerasi digitalisasi dan inklusi ekonomi serta keuangan nasional.

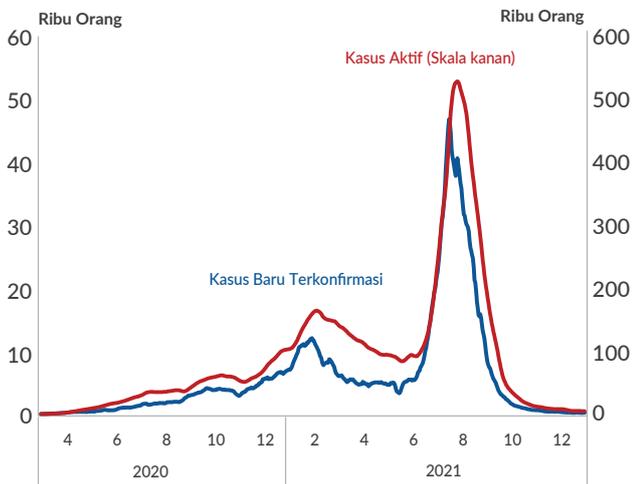
2.1

Penyebaran Covid-19 di Indonesia Masih Berlanjut

Proses pemulihan perekonomian Indonesia pada tahun 2021 tertahan oleh masih berlanjutnya pandemi Covid-19. Penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia pada tahun 2021 masih berlanjut dan terjadi dalam dua gelombang. Setelah terjadi peningkatan mobilitas masyarakat pada akhir tahun 2020, kasus Covid-19 di Indonesia kembali meningkat dan mencapai puncak pada akhir Januari 2021 dengan penambahan kasus lebih dari 13 ribu per hari yang utamanya terjadi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Memasuki bulan berikutnya, sejalan dengan implementasi kebijakan pembatasan mobilitas yang ditujukan untuk mengurangi tingkat infeksi, penambahan kasus baru mulai mengalami penurunan hingga pertengahan tahun 2021.

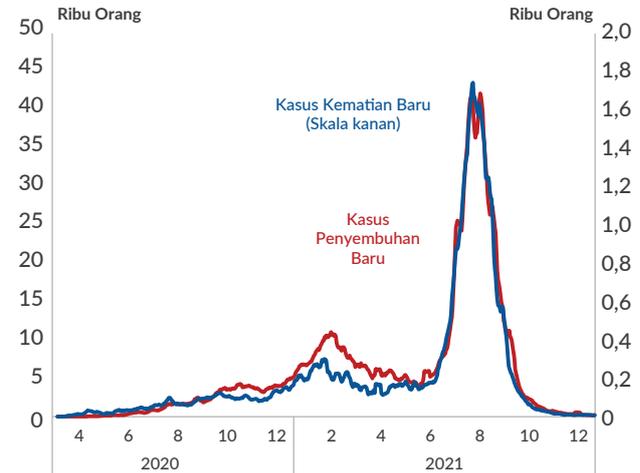
Namun, meningkatnya mobilitas dan merebaknya varian Delta yang jauh lebih menular menyebabkan kasus Covid-19 di Indonesia kembali meningkat. Peningkatan tersebut disertai dengan penambahan kasus yang jauh lebih cepat, dengan puncaknya mencapai lebih dari 50 ribu kasus per hari pada pertengahan Juli 2021 (Grafik 2.1). Akibat dari kondisi ini, jumlah kasus positif Covid-19 hingga bulan Juli meningkat menjadi sekitar 600 ribu orang diikuti jumlah kematian terkait Covid-19 per hari tertinggi yang mencapai sekitar 1.800 jiwa per hari. Sejumlah respons kebijakan, terutama di bidang kesehatan dari sisi hulu dan hilir, dilakukan oleh Pemerintah untuk menurunkan tingkat penularan dan fatalitas. Sebagai dampak kebijakan tersebut, jumlah kasus aktif terus menurun hingga di bawah 10 ribu orang sejalan dengan perkembangan tingkat kesembuhan dan tingkat kematian yang menurun menjadi di bawah 10 jiwa per hari (Grafik 2.2).

Grafik 2.1. Perkembangan Kasus Harian Covid-19



Sumber : Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, diolah

Grafik 2.2. Kasus Sembuh dan Kematian Covid-19

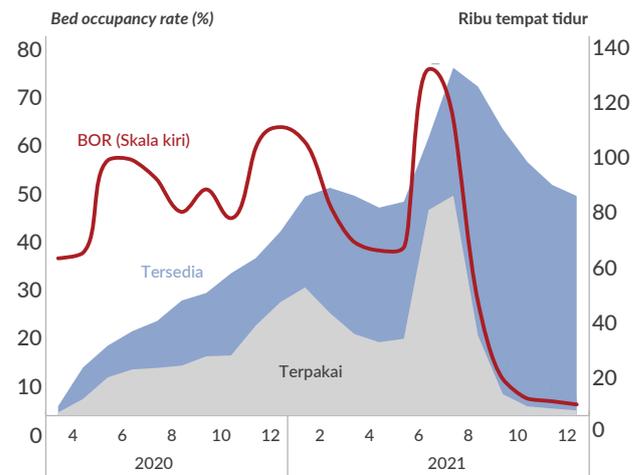


Sumber: Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, diolah

Pemerintah kembali menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas untuk menurunkan penyebaran Covid-19. Merespons gelombang pertama penambahan kasus Covid-19 pada awal tahun 2021, Pemerintah menerapkan kebijakan PPKM Mikro di wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut mengatur berbagai aktivitas masyarakat, antara lain mengenai jam operasi pasar dan pusat perbelanjaan, kapasitas restoran, perkantoran serta transportasi. Lonjakan kasus akibat Covid-19 varian Delta di bulan Juli 2021 mendorong Pemerintah untuk mengimplementasikan penguatan kebijakan PPKM Mikro yang diikuti dengan PPKM berdasarkan level keketatan yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Intensitas pembatasan kegiatan masyarakat tersebut, disesuaikan menurut level asesmen situasi pandemi yang terjadi di masing-masing Kabupaten/Kota. Penentuan tingkat pembatasan didasarkan pada standar World Health Organization (WHO) yang mengukur antara laju transmisi virus dibandingkan dengan kapasitas *testing, tracing* dan *treatment* (3T). Selain itu, jumlah kasus konfirmasi harian, tingkat *Bed Occupancy Rate* (BOR), dan pencapaian vaksinasi juga dijadikan dasar pertimbangan. Kebijakan pembatasan mobilitas antarnegara juga kembali diberlakukan dan perizinan orang asing untuk masuk ke Indonesia dilakukan secara lebih selektif.⁵

Pertambahan kasus Covid-19 terkendali seiring implementasi kebijakan Pemerintah. Kebijakan di sisi hulu mencakup antara lain pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat, intensifikasi *testing* dan *tracing*, serta percepatan vaksinasi. Sementara di sisi hilir, Pemerintah berupaya untuk menambah kapasitas perawatan rumah sakit, memenuhi kebutuhan tambahan tenaga kesehatan, alat kesehatan, dan obat-obatan, serta peningkatan kapasitas isolasi. Memasuki akhir bulan Juli, pertambahan kasus baru Covid-19 mulai melandai. Penurunan kasus baru terus berlanjut sehingga rerata penambahan kasus harian yang pada bulan Juli 2021 sebesar sekitar 45 ribu kasus per hari, terus menunjukkan tren penurunan

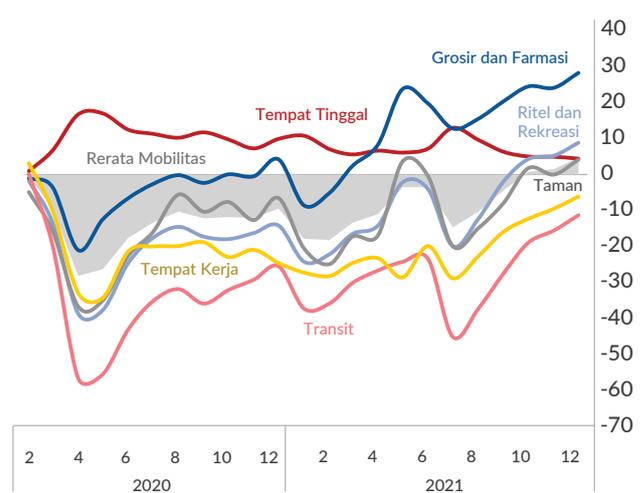
Grafik 2.3. *Bed Occupancy Rate* (BOR) Nasional



Sumber: Kementerian Kesehatan

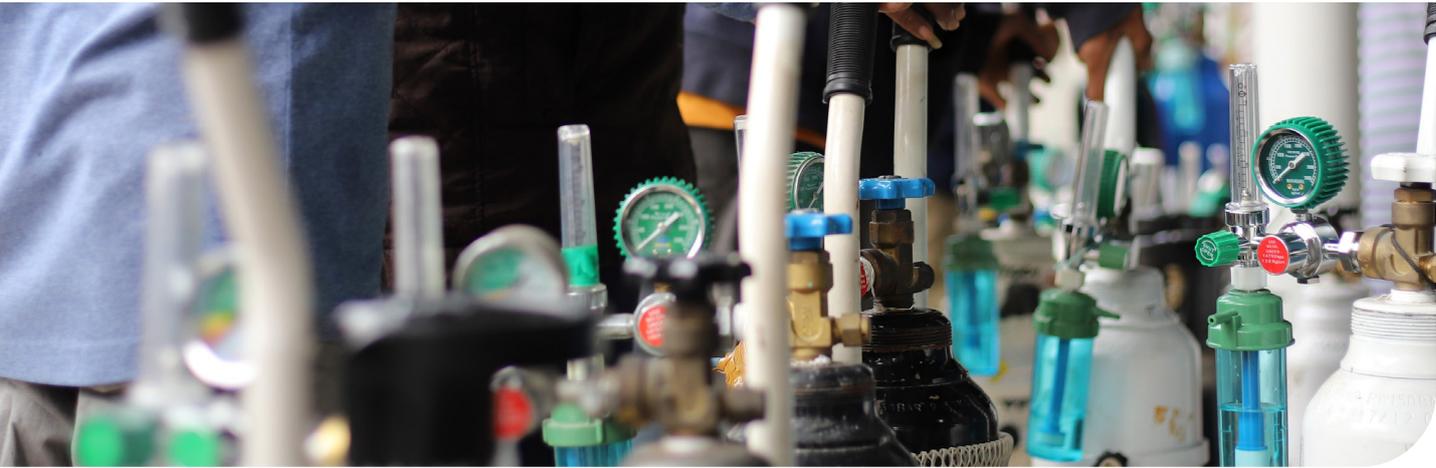
yang berlanjut sehingga rerata pertambahan kasus menjadi 300 kasus per hari pada bulan Desember 2021. *Positivity rate* yang sempat mencapai angka 30,55% di bulan Juli 2021, turun menjadi 1,5%. Perkembangan ini juga tercermin pada penurunan BOR dari 74% pada bulan Juni 2021 menjadi di bawah 10% sejak bulan November 2021 (Grafik 2.3). Perkembangan positif tersebut memungkinkan Pemerintah untuk mengurangi intensitas kebijakan restriksi mobilitas secara gradual dan berhati-hati agar tidak terjadi lonjakan kasus seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat (Grafik 2.4).

Grafik 2.4. Mobilitas Masyarakat Indonesia



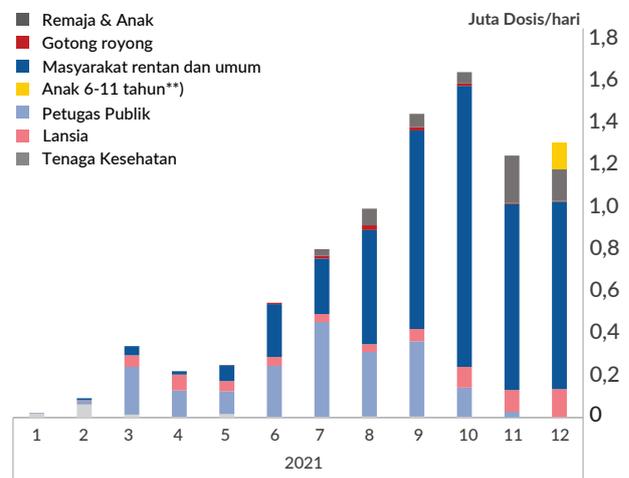
Sumber: Google COVID-19 Community Mobility Reports

5 <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3159/penerapan-ppkm-untuk-mengendalikan-laju-covid-19-dan-menjaga-kehidupan-masyarakat>



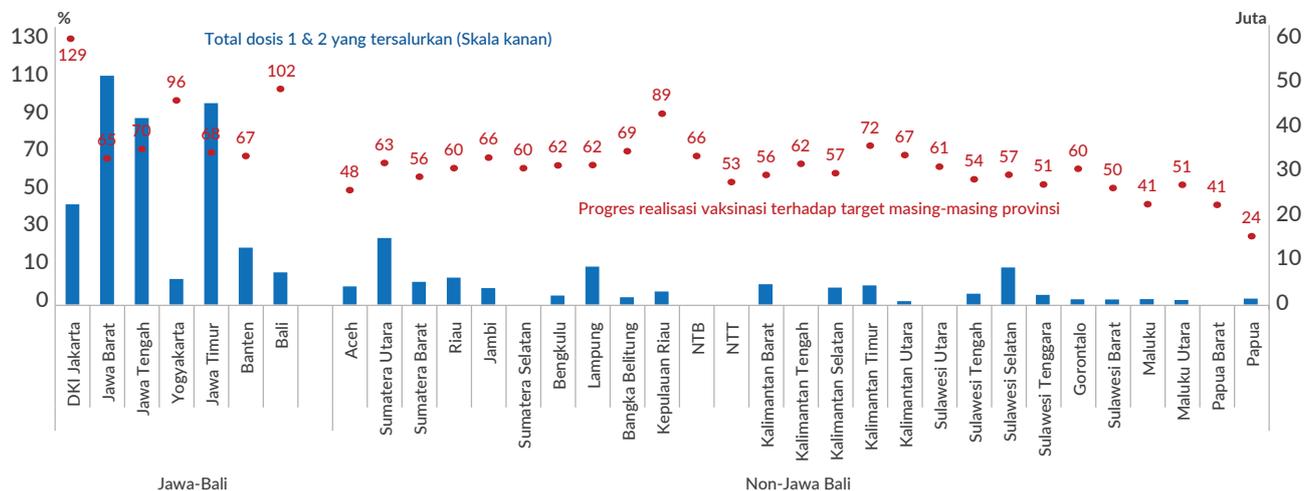
Untuk mengendalikan laju pandemi, Pemerintah juga mengakselerasi program vaksinasi Covid-19 yang telah dilaksanakan sejak awal tahun 2021. Dalam rangka membentuk kekebalan kelompok terhadap penularan Covid-19, Pemerintah telah menargetkan untuk memberikan vaksinasi Covid-19 kepada 208 juta penduduk. Walaupun pada awal 2021 laju vaksinasi sempat tertahan karena terbatasnya pasokan vaksin sehubungan dengan produksi yang masih rendah dan tingginya permintaan untuk vaksin di seluruh dunia, Indonesia tetap mampu menjalankan program vaksinasi. Laju vaksinasi, yang pada awal tahun sulit untuk mencapai tingkat 100 ribu dosis per hari, terus mengalami peningkatan sejalan dengan membaiknya pasokan dan program-program akselerasi vaksinasi sehingga mendorong vaksinasi mencapai sekitar 2 juta dosis per hari. Dengan perkembangan tersebut, pencapaian target vaksinasi pada akhir 2021 telah mencapai sekitar 60% dari target vaksinasi nasional (Grafik 2.5 dan 2.6).

Grafik 2.5. Kapasitas Vaksinasi



Sumber: Kementerian Kesehatan

Grafik 2.6. Realisasi Vaksinasi Spasial



Sumber: Kementerian Kesehatan

2.2

Momentum Perbaikan Ekonomi Sempat Tertahan di Tengah Stabilitas yang Terjaga

Proses pemulihan ekonomi domestik berlangsung pada semester I 2021. Pada triwulan I 2021, perbaikan ekonomi terlihat pada kontraksi yang lebih rendah dari triwulan IV 2020, yaitu dari 2,19% (yoy) menjadi 0,71% (yoy). Perbaikan terutama didorong oleh kinerja ekspor akibat kenaikan permintaan Tiongkok dan AS, realisasi belanja fiskal (belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial), serta investasi nonbangunan. Sementara itu, perbaikan konsumsi rumah tangga masih belum kuat dipengaruhi oleh masih terbatasnya mobilitas masyarakat sejalan dengan pengendalian Covid-19 di sejumlah wilayah. Secara spasial, perbaikan ekonomi terjadi di seluruh wilayah, dengan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) yang melanjutkan pertumbuhan positif.

Aktivitas ekonomi terus menguat pada triwulan II 2021. Perekonomian Indonesia pada triwulan II 2021 mencatat pertumbuhan positif untuk pertama kali sejak merebaknya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, sebesar 7,07% (yoy). Perbaikan terutama didorong oleh ekspor yang tumbuh tinggi didukung oleh kenaikan permintaan negara mitra dagang utama. Konsumsi rumah tangga untuk pertama kalinya tercatat tumbuh positif sejak triwulan II 2020, yaitu sebesar 5,96% (yoy), sejalan dengan perbaikan mobilitas masyarakat, berlanjutnya stimulus termasuk relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan kebijakan makroprudensial, serta pola musiman Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Kinerja investasi mulai tercatat positif terutama ditopang oleh perbaikan investasi nonbangunan. Sementara itu, konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi didorong oleh akselerasi realisasi stimulus fiskal dalam bentuk belanja barang dan belanja modal, khususnya terkait program PEN, serta belanja pegawai. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh kinerja positif seluruh lapangan usaha (LU) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah.

Namun, merebaknya Covid-19 varian Delta pada triwulan III 2021 menahan proses pemulihan ekonomi Indonesia. Kinerja perekonomian tetap tumbuh positif pada triwulan III 2021 sebesar 3,51%, lebih tinggi dibandingkan kontraksi 3,49% pada triwulan yang sama tahun lalu, namun lebih rendah dari 7,07% pada triwulan II 2021 (Tabel 2.1). Kebijakan pembatasan mobilitas yang harus ditempuh oleh Pemerintah untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 varian Delta pada bulan Juli-Agustus 2021 berdampak pada ekonomi, khususnya permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 1,03% pada triwulan III 2021, seiring masih terbatasnya konsumsi kelompok menengah-atas. Pembatasan mobilitas juga berdampak pada kenaikan investasi yang lebih rendah, yaitu sebesar 3,74% pada triwulan III 2021. Konsumsi Pemerintah mencatat pertumbuhan sebesar 0,66% (yoy) seiring realokasi belanja untuk akselerasi program pemulihan ekonomi nasional, termasuk penanganan Covid-19 varian Delta. Perlambatan pertumbuhan perekonomian yang lebih dalam tertahan oleh kontribusi positif dari kinerja ekspor yang tetap tinggi. Pertumbuhan ekspor pada triwulan III 2021 tetap terjaga mencapai 29,16% (yoy) sejalan dengan permintaan mitra dagang utama yang tetap kuat.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kinerja LU dipengaruhi oleh pembatasan mobilitas dan kinerja ekspor. LU Pertanian serta Pertambangan dan Penggalan pada triwulan III 2021 tumbuh meningkat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan permintaan dan harga komoditas global khususnya batu bara dan CPO (Tabel 2.2). LU Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial juga tumbuh meningkat seiring kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Sementara itu, LU Industri Pengolahan, Perdagangan, serta Konstruksi masih tumbuh positif meskipun melambat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya, disebabkan oleh menurunnya kegiatan

produksi dan konstruksi seiring pembatasan mobilitas. Kinerja LU terkait jasa dan mobilitas, seperti LU Transportasi dan Pergudangan serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, terkontraksi karena mobilitas yang berkurang dan kecenderungan masyarakat membatasi konsumsi barang non-esensial.

Secara spasial, hampir seluruh wilayah mencatat pertumbuhan positif meskipun lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Kinerja LU Industri Pengolahan yang berorientasi domestik melambat, terutama di Jawa, seiring pembatasan aktivitas produksi sektor esensial (Grafik 2.7). Namun, permintaan eksternal yang masih cukup kuat menopang kinerja LU Industri Pengolahan, terutama pada industri *Crude Palm Oil* (CPO) di Sumatera dan industri logam dasar di Sulampua. Pembatasan mobilitas masyarakat turut menahan kinerja LU Perdagangan, terutama di Jawa dan Balinusra. Sementara itu, ekonomi wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) tumbuh paling tinggi, diikuti Kalimantan dan Sumatera. Beberapa daerah, yakni Aceh, Jambi, dan Kalimantan Selatan, bahkan tumbuh meningkat dari triwulan sebelumnya, terutama ditopang oleh kinerja ekspor sejalan dengan

Tabel 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran (%yoy)

Komponen	2019	2020				2020	2021		
		I	II	III	IV		I	II	III
Konsumsi Rumah Tangga	5,04	2,83	-5,52	-4,05	-3,61	-2,63	-2,21	5,96	1,03
Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	10,62	-5,01	-7,82	-1,97	-2,14	-4,29	-3,99	4,15	2,96
Konsumsi Pemerintah	3,25	3,77	-6,90	9,76	1,76	1,94	2,58	8,03	0,66
Investasi (PMTDB)	4,45	1,70	-8,61	-6,48	-6,15	-4,95	-0,23	7,54	3,74
Investasi Bangunan	5,37	2,76	-5,26	-5,60	-6,63	-3,78	-0,74	4,36	3,36
Investasi Nonbangunan	1,80	-1,46	-18,62	-8,99	-4,71	-8,38	1,39	18,58	4,89
Ekspor	-0,87	0,36	-12,02	-11,66	-7,21	-7,70	7,09	31,98	29,16
Impor	-7,69	-3,62	-18,29	-23,00	-13,52	-14,71	5,38	31,72	30,11
PDB	5,02	2,97	-5,32	-3,49	-2,19	-2,07	-0,71	7,07	3,51

Sumber: BPS

peningkatan kinerja LU Pertambangan, khususnya batu bara. Pertumbuhan ekonomi Papua juga tercatat meningkat karena ditopang oleh berlanjutnya aktivitas investasi pembangunan tambang bawah tanah dan konstruksi terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX. Dari sisi eksternal, perbaikan permintaan global dan kenaikan harga komoditas ekspor utama menopang perekonomian

Tabel 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha (%yoy)

Komponen	2019	2020				2020	2021		
		I	II	III	IV		I	II	III
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,64	0,01	2,20	2,16	2,59	1,75	3,38	0,43	1,31
Pertambangan dan Penggalian	1,22	0,45	-2,72	-4,28	-1,20	-1,95	-2,02	5,22	7,78
Industri Pengolahan	3,80	2,06	-6,18	-4,34	-3,14	-2,93	-1,38	6,58	3,68
Pengadaan Listrik dan Gas	4,04	3,85	-5,46	-2,44	-5,01	-2,34	1,68	9,09	3,85
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,83	4,38	4,44	5,94	4,98	4,94	5,46	5,78	4,56
Konstruksi	5,76	2,90	-5,39	-4,52	-5,67	-3,26	-0,79	4,42	3,84
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,62	1,57	-7,59	-5,05	-3,64	-3,72	-1,23	9,45	5,16
Transportasi dan Pergudangan	6,40	1,30	-30,80	-16,71	-13,42	-15,04	-13,12	25,10	-0,72
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,80	1,94	-21,97	-11,81	-8,88	-10,22	-7,26	21,58	-0,13
Informasi dan Komunikasi	9,41	9,82	10,85	10,72	10,91	10,58	8,71	6,90	5,51
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,60	10,63	1,06	-0,95	2,37	3,25	-2,97	8,33	4,29
Real Estat	5,74	3,81	2,31	1,96	1,25	2,32	0,94	2,82	3,42
Jasa Perusahaan	10,25	5,39	-12,09	-7,61	-7,02	-5,44	-6,10	9,94	-0,59
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,67	3,15	-3,21	1,82	-1,55	-0,03	-2,91	9,63	-9,96
Jasa Pendidikan	6,29	5,87	1,19	2,41	1,36	2,63	-1,53	5,89	-4,42
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,68	10,39	3,71	15,29	16,54	11,60	3,38	11,68	14,06
Jasa lainnya	10,55	7,09	-12,60	-5,55	-4,84	-4,10	-5,15	11,97	-0,30
PDB	5,02	2,97	-5,32	-3,49	-2,19	-2,07	-0,71	7,07	3,51

Sumber: BPS



dengan kinerja ekspor yang positif dan permintaan domestik yang berangsur pulih, kinerja impor juga meningkat cukup tinggi pada paruh pertama 2021 sehingga menahan surplus neraca perdagangan lebih lanjut. Peningkatan impor terjadi menyeluruh pada seluruh jenis kelompok barang, terutama pada bahan baku dan bahan konsumsi. Defisit transaksi berjalan juga dikontribusikan oleh peningkatan defisit neraca jasa sejalan dengan aktivitas impor sehingga menyebabkan peningkatan pembayaran *freight* jasa transportasi. Selain itu, pemulihan kondisi domestik juga tercermin pada peningkatan pembayaran imbal hasil investasi langsung sejalan dengan membaiknya kinerja korporasi sektor migas dan nonmigas sehingga mendorong defisit neraca pendapatan primer. Sementara, neraca pendapatan sekunder membukukan kenaikan surplus di tengah relatif stabilnya transfer personal terkait penerimaan remitansi.

Kinerja transaksi modal dan finansial (TMF) mencatat surplus di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Pada semester I 2021, surplus TMF tercatat 7,3 miliar dolar AS, berbalik dari semester II 2020 yang mencatat defisit 76,0 juta dolar AS. Kenaikan surplus tersebut ditopang oleh aliran masuk investasi langsung dan investasi portofolio. Optimisme investor terhadap prospek pemulihan ekonomi domestik mendorong aliran masuk neto investasi langsung dengan tren yang makin meningkat sebesar 4,4 miliar dolar AS pada triwulan I 2021 dan 5,3 miliar dolar AS pada triwulan II 2021. Selain itu, aliran modal masuk investasi portofolio pada paruh pertama 2021 juga naik signifikan, baik dalam bentuk instrumen surat utang maupun saham. Investasi asing pada saham

mencatat aliran masuk neto sebesar 1,2 miliar dolar AS, setelah pada semester II 2020 mencatat aliran keluar neto 2,2 miliar dolar AS. Di sisi lain, defisit investasi lainnya meningkat terutama dipengaruhi oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri sektor publik dan swasta.

Perbaikan NPI berlanjut pada triwulan III 2021 sejalan dengan makin kuatnya kinerja ekspor, kendati peningkatan kasus Covid-19 varian Delta menahan proses pemulihan aktivitas ekonomi domestik. Transaksi berjalan pada triwulan III 2021 mencatat surplus sebesar 4,5 miliar dolar AS yang dikontribusikan oleh perbaikan kinerja neraca perdagangan. Kenaikan ekspor nonmigas pada triwulan III 2021 terus berlanjut serta merupakan nilai ekspor tertinggi sepanjang sejarah pencatatan, ditopang oleh kinerja ekspor komoditas utama seperti batu bara, CPO, kimia organik dan bijih logam seiring masih kuatnya permintaan dan akselerasi harga komoditas, khususnya harga batu bara. Perkembangan ekspor yang positif tersebut mengurangi dampak penurunan aktivitas ekonomi domestik akibat pembatasan mobilitas masyarakat guna menghambat penyebaran Covid-19 varian Delta. Sementara itu, surplus transaksi modal dan finansial pada triwulan III 2021 juga lebih tinggi di tengah peningkatan kasus Covid-19 dan kekhawatiran pengetatan kebijakan moneter global yang lebih cepat sejalan tren kenaikan inflasi dunia. Berbagai respons dan sinergi kebijakan otoritas mampu menjaga aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio walaupun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Transaksi investasi lainnya juga mencatatkan surplus, berbalik

dari defisit pada triwulan sebelumnya terutama disebabkan oleh tambahan alokasi *Special Drawing Rights* (SDR)⁶, peningkatan simpanan asing di bank dalam negeri, serta lebih rendahnya pembayaran pinjaman luar negeri, sesuai pola kuartalan. Secara keseluruhan, NPI triwulan III 2021 mengalami surplus 10,7 miliar dolar AS dan posisi cadangan devisa pada akhir triwulan III 2021 meningkat signifikan menjadi 146,9 miliar dolar AS.

Nilai tukar Rupiah relatif terjaga, di tengah ketidakpastian global yang belum sepenuhnya mereda. Hingga triwulan III 2021, nilai tukar Rupiah relatif terjaga dengan volatilitas yang rendah, ditopang oleh kinerja sektor eksternal yang tetap baik, persepsi positif terhadap ekonomi domestik, serta didukung oleh kebijakan stabilisasi nilai tukar Bank Indonesia. Pada awal tahun 2021, mata uang Kawasan Asia termasuk Rupiah menguat sejalan dengan optimisme perbaikan aktivitas ekonomi dunia yang relatif cepat sejalan dengan mulai dilaksanakannya vaksinasi di banyak negara. Penguatan tersebut berlangsung tidak lama sejalan dengan perkembangan Covid-19 varian Delta serta ketidakpastian pasar keuangan global yang belum sepenuhnya mereda. Hal tersebut menyebabkan penyesuaian aliran modal keluar dari negara berkembang yang didorong oleh perilaku *flight to quality*. Tekanan pelemahan Rupiah sempat meningkat di akhir Februari hingga Maret 2021, terutama dipicu oleh kenaikan imbal hasil UST 10 tahun seiring ekspektasi terhadap prospek ekonomi dan inflasi AS. Pada April dan Juli 2021, kekhawatiran atas merebaknya Covid-19 varian Delta turut memberikan tekanan terhadap Rupiah. Rupiah sempat tertekan hingga mencapai Rp14.610 per dolar AS pada 15 April 2021. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar melalui *triple intervention*, baik di pasar spot, pasar *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder, didukung juga dengan komunikasi intensif kepada para investor dan pelaku pasar domestik dan luar negeri. Didukung respons kebijakan tersebut, pergerakan Rupiah akhir triwulan III 2021 tetap terjaga dan tercatat mengalami apresiasi 1,49% (rata-rata) dan depresiasi sebesar

1,83% (*point-to-point*). Perkembangan tersebut lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang seperti Turki, Brazil, Thailand, dan Filipina.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) hingga triwulan III 2021 tercatat rendah sejalan dengan permintaan domestik yang belum kuat di tengah pasokan yang terjaga. Inflasi IHK pada September 2021 tercatat 1,60% (yoy), lebih rendah dari inflasi 2020 sebesar 1,68%. Inflasi yang lebih rendah tersebut dipengaruhi oleh penurunan inflasi kelompok inti dan *volatile food*, di tengah peningkatan inflasi kelompok *administered prices*. Dinamika triwulanan inflasi IHK menunjukkan tingkat inflasi yang rendah pada triwulan I 2021, dipengaruhi permintaan yang masih rendah seiring diberlakukannya kebijakan pembatasan mobilitas. Inflasi meningkat pada triwulan II 2021 mencerminkan proses pemulihan ekonomi yang berlangsung secara bertahap serta dampak musiman periode HBKN. Namun, tekanan inflasi kembali melandai pada triwulan III 2021 dipengaruhi oleh adanya kebijakan pembatasan mobilitas terkait peningkatan kasus Covid-19, yang berdampak pada tertahannya permintaan.

Inflasi inti tetap rendah. Inflasi inti pada September 2021 tercatat sebesar 1,30% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada 2020 sebesar 1,60% (yoy). Hal ini sejalan dengan belum kuatnya permintaan domestik, terjaganya stabilitas nilai tukar, terbatasnya transmisi kenaikan harga global ke domestik, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi pada kisaran target. Rendahnya inflasi inti terutama disumbang oleh rendahnya inflasi inti *non-traded non-food*, yang umumnya merupakan komoditas jasa, seiring tertahannya permintaan pada periode pembatasan mobilitas. Selain itu, lebih rendahnya inflasi inti turut disumbang oleh disinflasi komoditas emas perhiasan sejalan dengan penurunan harga emas global dan komoditas mobil seiring penerapan diskon PPnBM sebesar 100%. Perkembangan inflasi inti tersebut sejalan ekspektasi pelaku ekonomi terhadap inflasi yang tetap terkendali. Hingga triwulan III 2021, *consensus forecast* inflasi berada dalam tren yang menurun, dari 2,30% pada Januari 2021 menjadi 1,80% pada September 2021.

6 SDR adalah cadangan devisa internasional (*international reserve assets*) yang diciptakan IMF sejak tahun 1969 dan berfungsi sebagai tambahan cadangan devisa negara-negara anggota IMF. Pada Agustus 2021, IMF telah mendistribusikan SDR kepada seluruh negara anggota, termasuk Indonesia, untuk mendukung pemulihan ekonomi global akibat dampak pandemi Covid-19, membangun kepercayaan pelaku ekonomi, dan memperkuat cadangan devisa global dalam jangka panjang.

Inflasi kelompok *volatile food* (VF) terjaga, didukung oleh pasokan barang yang memadai di tengah permintaan yang belum pulih. Inflasi VF tercatat 3,51% (yoy) pada September 2021, menurun dibandingkan inflasi VF pada Desember 2020 sebesar 3,62% (yoy). Inflasi VF yang terjaga dipengaruhi oleh koreksi harga pada beberapa komoditas akibat tertahannya permintaan terutama dari hotel, restoran, dan kafe (Horeka) sejalan dengan penerapan pembatasan mobilitas. Realisasi inflasi VF tersebut juga didukung oleh pasokan yang memadai dari panen raya dan distribusi di berbagai daerah yang terjaga. Inflasi VF pada triwulan I 2021 mengalami peningkatan sejalan dengan curah hujan yang tinggi di awal tahun dan produksi yang rendah terkait permasalahan insentif petani. Pada triwulan II 2021, inflasi VF menurun seiring dengan belum kuatnya permintaan selama bulan puasa dan lebaran serta produksi yang membaik didukung cuaca yang kondusif. Inflasi VF kembali menurun lebih dalam pada triwulan III 2021 seiring rendahnya permintaan dan masuknya musim panen raya khususnya beras dan hortikultura sehingga pasokan meningkat.

Inflasi *administered prices* (AP) terjaga rendah seiring dengan minimnya kebijakan penyesuaian tarif oleh Pemerintah, meski mulai meningkat pada akhir triwulan III 2021 sejalan dengan berlanjutnya transmisi kenaikan cukai tembakau ke harga jual rokok. Inflasi AP terjaga rendah pada triwulan I dan II 2021 sebesar 0,88% (yoy) dan 0,49% (yoy) seiring dengan minimnya kebijakan penyesuaian tarif oleh Pemerintah di tengah belum pulihnya permintaan masyarakat. Inflasi AP angkutan, terutama angkutan udara, tercatat rendah, selama Januari hingga September 2021, masih berada dalam zona deflasi dibandingkan periode yang sama di 2020 seiring terbatasnya mobilitas masyarakat akibat pengetatan persyaratan penerbangan. Pada September 2021, inflasi AP meningkat dan tercatat sebesar 0,99% (yoy), terutama didorong oleh inflasi aneka rokok sejalan dengan berlanjutnya transmisi kenaikan cukai tembakau. Sementara itu, inflasi AP komoditas energi terjaga rendah seiring minimnya penyesuaian harga energi oleh Pemerintah, di tengah perkembangan harga energi global yang terus meningkat.

Kondisi likuiditas sangat longgar didorong kebijakan moneter yang akomodatif dan dampak sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia telah menambah likuiditas (*quantitative easing*) di perbankan sebesar Rp128,86 triliun pada tahun 2021 (hingga 30 September 2021). Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2021 sebesar Rp141,34 triliun (hingga 30 September 2021) yang terdiri dari Rp65,88 triliun melalui mekanisme lelang utama dan Rp75,46 triliun melalui mekanisme *Greenshoe Option* (GSO). Dengan ekspansi moneter tersebut, kondisi likuiditas perbankan pada September 2021 sangat longgar, tercermin pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi, yakni 33,53%. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat 7,69% (yoy), melambat dibandingkan bulan sebelumnya sejalan dengan pemulihan aktivitas usaha dan konsumsi masyarakat. Likuiditas perekonomian meningkat, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh meningkat masing-masing sebesar 11,2% (yoy) dan 8,0% (yoy). Pertumbuhan uang beredar tersebut terutama didukung oleh kredit perbankan yang mengindikasikan semakin meningkatnya pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional.

Suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang sangat longgar mendorong suku bunga kredit perbankan terus menurun. Di pasar uang dan pasar dana, suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) *overnight* dan suku bunga deposito 1 bulan perbankan telah menurun, masing-masing sebesar 50 bps dan 171 bps sejak September 2020 menjadi 2,80% dan 3,28% pada September 2021. Di pasar kredit, penurunan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan terus berlanjut, diikuti penurunan suku bunga kredit baru. Aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang meningkat mendorong perbaikan persepsi risiko perbankan, sehingga berdampak positif bagi penurunan suku bunga kredit baru. Bank Indonesia tetap mendorong berlanjutnya penurunan suku bunga kredit sebagai bagian dari upaya bersama dengan perbankan untuk mendorong kredit kepada dunia usaha.

Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan turut berkontribusi dalam perbaikan kinerja ekonomi makro. Pada Semester I 2021, stabilitas keuangan yang terjaga dan berangsur pulih tersebut tercermin pada sejumlah indikator. Dari sisi permodalan, ketahanannya tercermin dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan pada Juni 2021 yang tetap tinggi sebesar 24,30%, meningkat dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 22,50%. Rasio kecukupan modal ini berada di atas *threshold* persyaratan prudensial sebesar 8%. Dari sisi risiko kredit, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) tetap terjaga pada level yang rendah yakni 3,24% secara bruto atau 1,06% secara neto pada Juni 2021. Hal tersebut juga didukung oleh ketahanan likuiditas perbankan yang semakin kuat dan berada pada posisi yang tinggi sebagaimana ditunjukkan oleh rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang meningkat pada Juni 2021 sebesar 32,95% dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 26,24%.

Sejalan dengan perekonomian yang berangsur pulih tersebut, kinerja intermediasi perbankan juga menunjukkan sinyal perbaikan pada akhir Semester I 2021. Pertumbuhan kredit pada Juni 2021 menunjukkan arah perbaikan meskipun masih terbatas dengan pertumbuhan positif sebesar 0,59% (yoy), dibandingkan pada Desember 2020 yang mengalami penurunan sebesar -2,41% (yoy). Pertumbuhan positif dari kredit tersebut utamanya ditopang oleh penyaluran kredit konsumsi dan kredit modal kerja sejalan dengan mulai dibukanya dunia usaha dan relaksasi mobilitas masyarakat pasca dimulainya program vaksinasi masal oleh Pemerintah. Sementara itu, kontraksi kredit investasi pada Juni 2021 cenderung menurun dibandingkan akhir tahun 2020, sejalan dengan membaiknya aktivitas usaha meski sejumlah pelaku ekonomi masih cenderung *wait and see*.

Dana pihak ketiga (DPK) dan kinerja perbankan pada Semester I 2021 mengalami peningkatan seiring perekonomian yang berangsur pulih. Pertumbuhan DPK mengalami peningkatan dari posisi Desember 2020 sebesar 11,11% (yoy) menjadi 11,28% (yoy) pada Juni 2021. Peningkatan DPK utamanya bersumber dari peningkatan giro dan tabungan,

sejalan dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas dunia usaha yang mulai membaik serta dukungan fiskal dari Pemerintah. Peningkatan kinerja perbankan tercermin pada aspek efisiensi yang tercermin dari rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional sebesar 84,53% pada Juni 2021, terus membaik dibandingkan periode Desember 2020 sebesar 86,55%. Pada aspek profitabilitas, rasio imbal hasil terhadap aset (*Return on Asset*) juga menunjukkan peningkatan menjadi sebesar 1,88% pada Juni 2021, lebih tinggi dibandingkan posisi Desember 2020 sebesar 1,59%. Selisih bunga bersih (*Net Interest Margin*) juga meningkat menjadi 4,56% pada Juni 2021 dibandingkan Desember 2020 sebesar 4,32%.

Stabilitas Sistem Keuangan tetap terjaga meski varian delta sempat merebak pada awal triwulan III 2021. Kondisi tersebut tercermin dari Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) yang tetap rendah dan berada di zona normal-stabil pada periode puncak penyebaran varian Delta, yakni Juni-Juli 2021. Kuatnya permodalan perbankan di tengah likuiditas yang melimpah membuat dampak varian Delta terhadap ketahanan perbankan relatif terbatas. Tingkat ketahanan permodalan dan likuiditas bank tetap tinggi dan relatif stabil, masing-masing 24,30% dan 32,95% pada Juni 2021 serta 24,57% dan 32,51% pada Juli 2021. Rasio kredit bermasalah juga tetap terjaga pada level yang rendah dengan tingkat NPL secara bruto sebesar 3,24% pada Juni dan 3,35% pada Juli 2021. Seiring dengan semakin membaiknya penanganan Covid-19 dan peningkatan aktivitas masyarakat pada Agustus 2021, pertumbuhan kredit meningkat dengan stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga (Tabel 2.3).

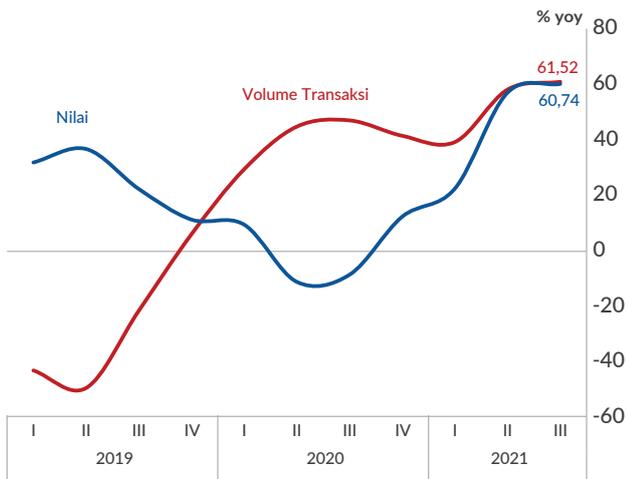
Tabel 2.3. Kondisi Sistem Keuangan pada Periode Penyebaran Covid-19 Varian Delta

2021	AL/DPK (%)	CAR (%)	NPL (%)	Kredit (%)	Spread Suku Bunga Kredit Baru terhadap SBDK (%)
Mei	32,71	24,28	3,35	-1,28	-0,09
Juni	32,95	24,30	3,24	0,59	0,11
Juli	32,51	24,57	3,35	0,50	0,59
Agustus	32,67	24,38	3,35	1,16	-0,07

Keterangan Periode Penyebaran Varian Delta

Sumber: Bank Indonesia

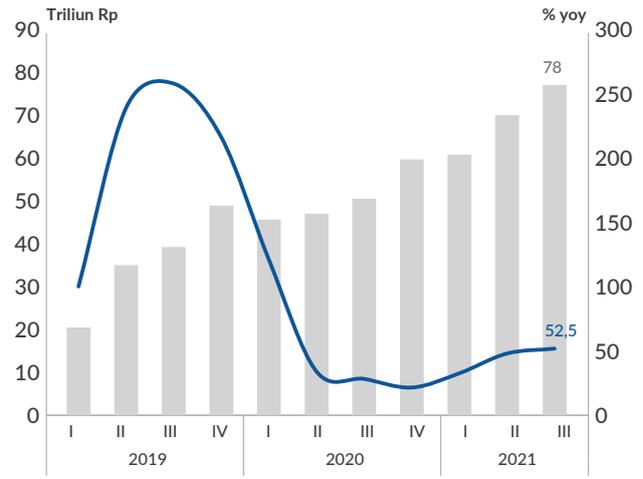
Grafik 2.8. Transaksi Digital Banking



Sumber: Bank Indonesia

Transaksi ekonomi dan keuangan digital terus tumbuh meningkat di tengah tertahannya transaksi ritel pada masa pembatasan mobilitas pada triwulan III 2021. Hingga triwulan III 2021, nilai nominal transaksi e-commerce meningkat pesat 61,7% (yoy) menjadi Rp291,5 triliun, seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking. Nilai transaksi digital banking sampai dengan triwulan III 2021 juga meningkat 46,72% (yoy) (Grafik 2.8). Demikian pula, nilai transaksi Uang Elektronik (UE) sampai dengan triwulan III 2021 juga meningkat 45,05% (yoy) (Grafik 2.9). Perkembangan tersebut didukung pula oleh berbagai program digitalisasi sistem pembayaran, seperti perluasan QR Indonesia Standard (QRIS),

Grafik 2.9. Transaksi Uang Elektronik



Sumber: Bank Indonesia

Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) dan reformasi regulasi, serta rencana implementasi BI-FAST, yang terus diakselerasi. Di sisi lain, transaksi pembayaran ritel seperti ATM debit dan kartu kredit secara kumulatif masih tumbuh positif, meskipun sedikit menurun pada triwulan III 2021 dipengaruhi oleh pembatasan mobilitas. Penurunan juga terjadi pada sisi tunai yang tercermin dari pertumbuhan UYD pada September 2021 yang sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Juni 2021 sebesar 11,75% (yoy). Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang di seluruh wilayah Indonesia, dengan penguatan strategi distribusi uang dan pembukaan kembali layanan kas seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas di masing-masing daerah.

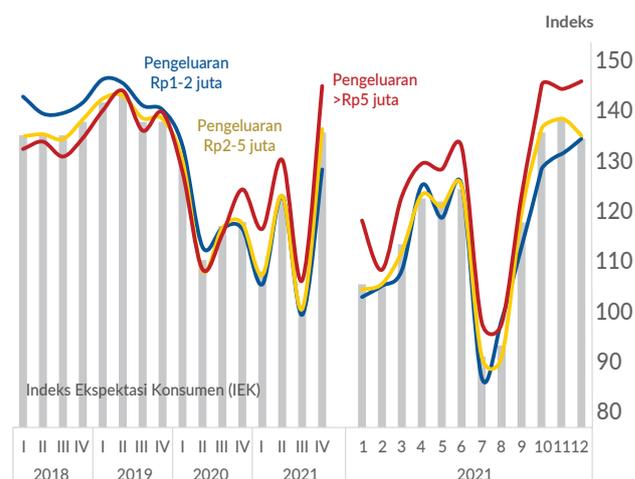
2.3

Momentum Perbaikan Perekonomian Indonesia Diprakirakan Berlanjut

Kinerja ekonomi diprakirakan meningkat pada triwulan IV 2021, didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi, pembukaan sektor-sektor ekonomi yang lebih luas, stimulus kebijakan yang berlanjut, dan tetap kuatnya kinerja ekspor. Keberhasilan penanganan kesehatan serta akselerasi dan perluasan vaksinasi memungkinkan penurunan level PPKM secara gradual dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan. Hal ini mendorong mobilitas meningkat di berbagai daerah menuju level prapandemi Covid-19. Pembukaan sektor prioritas terutama sektor manufaktur juga terus diperluas seiring menurunnya tingkat PPKM dengan menerapkan prasyarat berupa telah memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), seluruh pekerjanya telah divaksinasi, dan mendorong penggunaan aplikasi peduli lindungi di lingkungan industri. Sejalan dengan hal tersebut, realisasi stimulus Pemerintah berlanjut, terutama dalam bentuk bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Perbaikan ekonomi juga masih akan ditopang oleh kinerja ekspor juga tetap kuat seiring perbaikan ekonomi global.

Perbaikan ekonomi ditopang oleh mulai membaiknya permintaan domestik di tengah tetap kuatnya kinerja ekspor. Mobilitas yang kembali meningkat mendorong aktivitas masyarakat dan pulihnya keyakinan konsumen sehingga konsumsi rumah tangga diprakirakan mulai membaik pada triwulan IV 2021. Kinerja investasi juga meningkat, terutama investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya kegiatan konstruksi Pemerintah seiring realisasi belanja modal Pemerintah serta mulai meningkatnya aktivitas konstruksi swasta. Sementara itu, permintaan global yang terus membaik mendorong tetap kuatnya kinerja ekspor ditopang beberapa komoditas utama, seperti batu bara, CPO, dan besi dan baja. Seiring dengan pemulihan permintaan domestik dan tetap kuatnya ekspor, impor juga tumbuh meningkat. Perbaikan ekonomi pada triwulan

Grafik 2.10. Ekspektasi Konsumen



Sumber: Bank Indonesia

IV 2021 tercermin dari perkembangan positif berbagai indikator pada periode yang sama seperti ekspektasi konsumen yang menguat signifikan (Grafik 2.11). PMI Manufaktur juga berada pada fase ekspansi dengan indeks yang meningkat ke level yang tinggi yakni 53,5 pada Desember 2021 (Grafik 2.12). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2021 diprakirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia yaitu 3,2-4,0%. Proses pemulihan ekonomi tersebut mendukung

Grafik 2.11. Purchasing Managers' Index (PMI)



Sumber: Markit Economics



perbaikan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari penurunan tingkat pengangguran menjadi 6,49% pada Agustus 2021 dari capaian sebelumnya 7,07% pada Agustus 2020.

Kinerja LU yang terkait dengan konsumsi dan investasi meningkat. Kinerja LU industri pengolahan diperkirakan meningkat pada triwulan IV 2021 ditopang peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan baik dari domestik maupun eksternal. Seiring pembukaan aktivitas ekonomi, kinerja LU yang terkait mobilitas dan konsumsi yakni LU Transportasi dan Pergudangan, LU Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman, serta LU Perdagangan tumbuh meningkat. LU konstruksi juga terus meningkat sejalan dengan aktivitas konstruksi Pemerintah dan swasta, serta didukung oleh stimulus kebijakan serta meningkatnya pendanaan yang bersumber dari akselerasi belanja modal Pemerintah serta perbaikan kredit terkait properti. Sementara itu, kinerja pada triwulan IV untuk LU yang terkait ekspor komoditas, yakni LU Pertanian dan LU Pertambangan, diperkirakan tetap tinggi sejalan dengan permintaan ekspor terutama dari AS dan Tiongkok.

Secara spasial, proses pemulihan ekonomi beberapa wilayah di Indonesia didukung oleh perbaikan permintaan domestik dan eksternal. Mobilitas di berbagai daerah yang sudah kembali berada di atas level prepandemi Covid-19 seiring pelonggaran PPKM level mendukung mulai pulihnya konsumsi daerah. Hal tersebut tercermin dari indikator

penjualan, keyakinan konsumen, dan indeks *job vacancy* yang meningkat di hampir seluruh wilayah. Kinerja investasi terutama investasi bangunan di daerah juga meningkat ditopang oleh perkembangan proyek strategis nasional (PSN) dengan realisasi terbesar pada pembangunan jalan tol di Jawa. Realisasi TKDD yang membaik pada triwulan IV 2021, sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mempercepat dan memperbaiki pemenuhan persyaratan administratif, mendukung perbaikan ekonomi daerah. Kinerja ekonomi wilayah Sulampua, Sumatera, dan Kalimantan turut ditopang oleh kinerja ekspor komoditas yang tetap tinggi. Di Jawa, kinerja ekonomi turut ditopang oleh kinerja ekspor manufaktur. Sementara itu, ekonomi wilayah Balinusra mulai tumbuh positif meskipun terbatas seiring kinerja pariwisata yang masih belum sepenuhnya pulih. Dengan perkembangan tersebut, ekonomi wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Balinusra, dan Sulampua akan tumbuh masing-masing sebesar 3,2-4,0%; 2,7-3,5%; 2,8-3,6%; 0,2-1,0%, dan 5,8-6,6%.

Peningkatan aktivitas ekonomi domestik dan pemulihan ekonomi global yang terus berlangsung diperkirakan mampu menopang kinerja NPI. Perkembangan NPI diperkirakan tetap baik pada triwulan IV 2021 didukung oleh masih kuatnya kinerja transaksi berjalan seiring masih tingginya harga komoditas ekspor dan permintaan global. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global

yang meningkat serta kekhawatiran akan penyebaran Covid-19 varian Omicron menyebabkan terbatasnya kinerja neraca TMF. Dengan perkembangan tersebut, NPI triwulan IV dan keseluruhan 2021 diperkirakan tetap solid, dan mendukung posisi cadangan devisa pada akhir 2021 tetap tinggi, yaitu 144,9 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 135,9 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembayaran 8,0 bulan impor dan 7,8 bulan impor dan Utang Luar Negeri (ULN) pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 (tiga) bulan impor. NPI yang membaik juga didukung profil ULN yang aman dan terkendali. ULN korporasi nonkeuangan berkontraksi 1,0% (yoy) pada November 2021 di tengah peningkatan sumber pembiayaan ekonomi lain dari domestik sejalan dengan peningkatan kinerja korporasi. ULN tersebut terutama untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan di sektor energi, manufaktur dan pertambangan. Keseluruhan rasio ULN terhadap PDB pada 2021 menurun dibandingkan 2020 serta berada pada kisaran rata-rata negara *peer*. Komposisi ULN juga tetap sehat tercermin dari rasio ULN jangka pendek yang berada di bawah rerata *peer* dan ULN jangka panjang yang lebih dominan mencapai 89%.⁷

Kinerja NPI yang terjaga dipengaruhi oleh kinerja positif transaksi berjalan yang berlanjut. Pada triwulan IV 2021, perkembangan transaksi berjalan diperkirakan tetap baik, berlanjut dari capaian pada triwulan III 2021 yang mencatat surplus 4,5 miliar dolar AS. Hal ini dikontribusikan oleh surplus neraca perdagangan barang seiring dengan pertumbuhan ekspor yang masih tinggi. Kinerja positif tersebut didukung oleh ekspor batu bara ke Tiongkok dan Jepang, serta ekspor pakaian ke AS yang mengalami peningkatan sejalan dengan pemulihan ekonomi dan kebutuhan menghadapi musim dingin. Ekspor besi dan baja juga tetap tinggi seiring perbaikan aktivitas manufaktur di Tiongkok dan India. Di sisi lain, kinerja impor juga meningkat guna mendukung aktivitas ekspor dan kenaikan permintaan domestik sejalan pelonggaran level PPKM. Perbaikan kondisi ekonomi domestik dan aktivitas impor tersebut pada gilirannya mendorong peningkatan defisit neraca pendapatan primer dan neraca jasa di tengah perkembangan jasa perjalanan (travel) yang belum kembali pulih ke level prapandemi. Untuk keseluruhan tahun 2021,

transaksi berjalan diperkirakan mencatat surplus sekitar 0,2% dari PDB, membaik dibandingkan tahun 2020 yang mencatat defisit 0,4% dari PDB.

Ketidakpastian di pasar keuangan global yang meningkat dan dinamika perkembangan kasus Covid-19 mengakibatkan aliran modal asing ke pasar keuangan domestik lebih terbatas sehingga menahan kinerja NPI lebih lanjut. Kinerja TMF pada triwulan IV 2021 diperkirakan lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Aliran modal asing dalam bentuk investasi langsung diperkirakan tetap surplus sejalan dengan pemulihan ekonomi domestik serta didukung berbagai langkah otoritas untuk meningkatkan investasi, termasuk kegiatan promosi ke negara mitra dagang. Sementara itu, kinerja investasi portofolio diperkirakan terbatas seiring dengan sentimen *risk-off* investor asing yang dipengaruhi rencana pengetatan kebijakan moneter negara maju yang lebih cepat dan kekhawatiran akan meningkatnya kasus Covid-19 seiring menyebarnya varian Omicron di sejumlah negara. Aliran keluar neto portofolio asing dari pasar SBN domestik tercatat 4,9 miliar dolar AS, sedangkan aliran masuk neto pada instrumen saham tercatat 0,8 miliar dolar AS sepanjang triwulan IV 2021. Secara keseluruhan tahun 2021, neraca TMF diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya ditopang peningkatan investasi langsung dan investasi portofolio sejalan dengan besarnya likuiditas global, optimisme terhadap pemulihan ekonomi domestik, dan imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik.

Sejalan dengan kinerja NPI, nilai tukar Rupiah bergerak stabil pada triwulan IV 2021. Nilai tukar Rupiah pada Triwulan IV 2021 tercatat melemah tipis 0,42% secara *point-to-point* dan 0,80% secara rerata dibandingkan dengan Triwulan III 2021. Perkembangan tersebut didukung oleh fundamental ekonomi Indonesia khususnya kinerja ekspor dan eksternal, aliran masuk modal asing, dan langkah kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia. Dengan perkembangan ini, secara *point-to-point* (ptp), Rupiah terdepresiasi 1,42% dan ditutup di level Rp14.252 per dolar AS pada akhir 2021. Secara rerata keseluruhan tahun 2021, nilai tukar rupiah menguat 1,60% ke level Rp 14.296 per dolar AS, dari Rp 14.525 per dolar AS pada 2020. Perkembangan tersebut tercatat lebih baik dibandingkan mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti India,

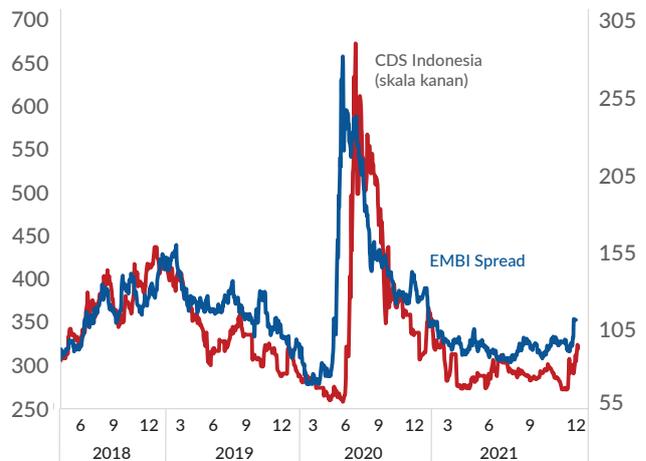
7 Berdasarkan jangka waktu asal (*original maturity*)

Malaysia, Filipina, dan Thailand (Grafik 2.13). Stabilitas nilai tukar Rupiah juga didukung oleh persepsi risiko investor global atas investasi portofolio di Indonesia, seperti tercermin pada perkembangan *Credit Default Swap* (CDS), yang relatif stabil (Grafik 2.14). Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar, melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar.

Terjaganya nilai tukar Rupiah juga ditopang oleh pasokan valas residen dan nonresiden. Sepanjang 2021, pasokan valas dari pelaku domestik tercatat sebesar 9,1 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan 2020 (Grafik 2.15). Kondisi ini terutama ditopang oleh pasokan valas korporasi sejalan dengan kinerja ekspor yang tumbuh meningkat di tengah impor yang masih relatif terbatas terutama pada semester I 2021 serta pembiayaan ULN korporasi yang tumbuh melambat. Sementara itu, nonresiden juga mencatat net penawaran valas sebesar 4,7 miliar dolar AS pada 2021, berbalik dari net permintaan valas pada 2020. Pasokan valas dari nonresiden terjadi seiring aliran modal asing yang masuk kembali. Keyakinan dan persepsi investor yang terjaga serta imbal hasil Indonesia yang masih menarik mendorong masuknya aliran portofolio asing ke Indonesia, terutama ke pasar saham di tengah *outflow* di pasar SBN.

Secara keseluruhan, stabilitas nilai tukar Rupiah pada 2021 yang bergerak sesuai dengan fundamental juga didukung oleh ketersediaan instrumen lindung nilai. Seiring ketidakpastian global yang meningkat, pelaku pasar melakukan upaya lindung nilai terhadap

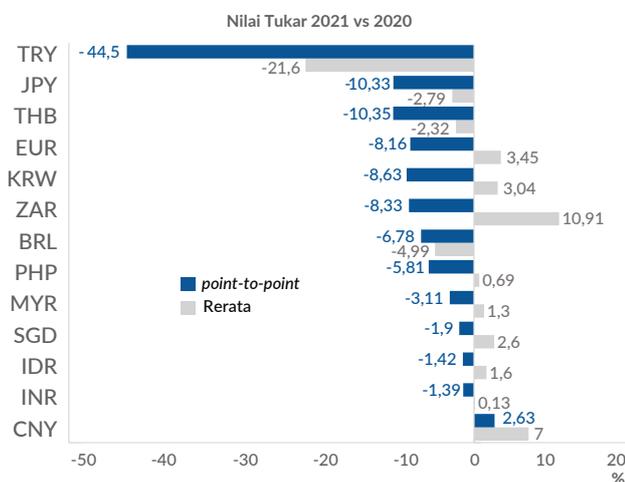
Grafik 2.13. Persepsi Risiko di Negara Berkembang dan Indonesia



Sumber: Bloomberg

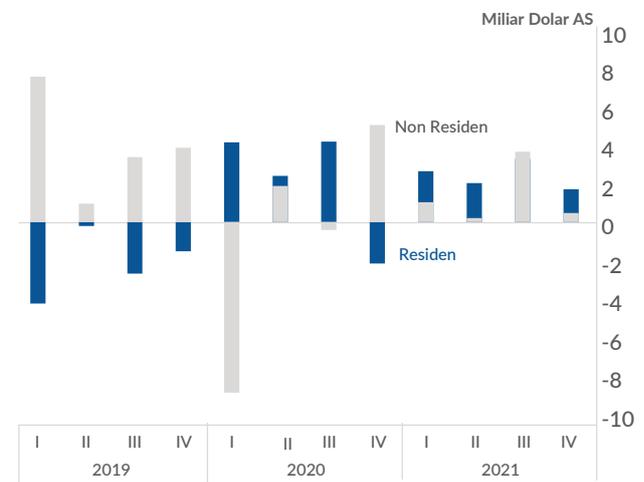
pelemahan nilai tukar Rupiah melalui transaksi derivatif. Komposisi derivatif di pasar valas relatif stabil di kisaran 37% dari total transaksi di tahun 2021. Ketersediaan jenis instrumen lindung nilai seperti *cross currency swap* dan *call spread option* terindikasi berdampak pada ketersediaan instrumen transaksi yang lebih beragam sehingga mengurangi tekanan ke pasar spot Rupiah. Peningkatan transaksi derivatif juga untuk memenuhi kebutuhan lindung nilai pelaku pasar dalam rangka Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK). Dari total pelapor KPPK ULN pada triwulan II 2021, sebanyak 89,9% sudah memenuhi *hedging* untuk 0-3 bulan ke depan dan 94,2% telah memenuhi *hedging* untuk 3-6 bulan ke depan.

Grafik 2.12. Apresiasi dan Depresiasi Nilai Tukar



Sumber: Reuters dan Bloomberg

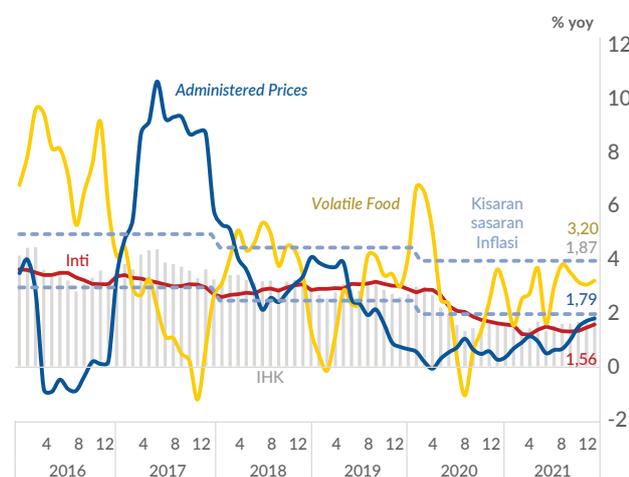
Grafik 2.14. Permintaan dan Penawaran Valas



Sumber: Bank Indonesia

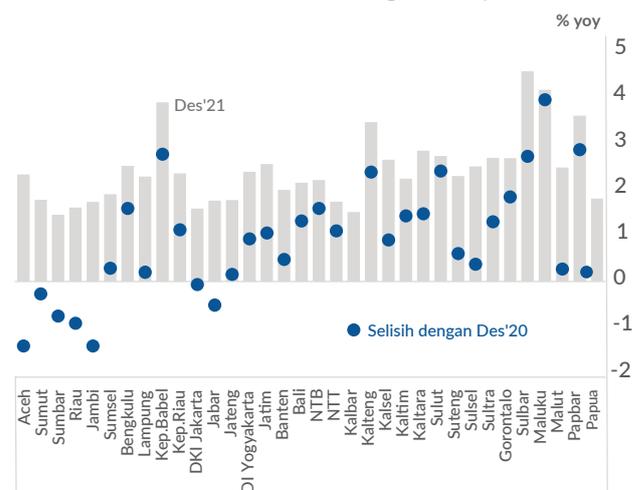
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap rendah hingga akhir tahun 2021 dengan sedikit peningkatan pada triwulan IV 2021 seiring kenaikan mobilitas. Inflasi IHK Desember 2021 tercatat 1,87% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi September 2021 sebesar 1,60% (yoy). Inflasi yang berada sedikit di bawah kisaran sasaran tersebut dipengaruhi oleh tertahannya permintaan domestik sebagai dampak kenaikan kasus Covid-19, khususnya yang terjadi pada triwulan III 2021. Selain itu, nilai tukar yang stabil dan ekspektasi inflasi yang terjaga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan, serta sinergi kebijakan yang konsisten antara Bank Indonesia dan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menjaga kestabilan harga juga berkontribusi kepada tetap terkendalinya pergerakan harga. Capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi akhir tahun 2020 sebesar 1,68% (yoy) (Grafik 2.16). Peningkatan inflasi tersebut sejalan dengan mulai pulihnya mobilitas serta pola musiman HBKN sehingga meningkatkan permintaan atas barang dan jasa akhir tahun. Peningkatan inflasi terjadi pada kelompok inti dan *administered prices* (AP), di tengah tetap terjaganya inflasi *volatile food* (VF). Secara spasial, kenaikan inflasi IHK terjadi di seluruh daerah, dengan inflasi tertinggi tercatat di Sulawesi Barat (4,40%), Maluku (4,01%), dan Kepulauan Bangka Belitung (3,75%) (Grafik 2.17). Ke depan, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjaga inflasi sesuai kisaran targetnya.

Grafik 2.15. Inflasi IHK



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.16. Inflasi IHK di Berbagai Wilayah

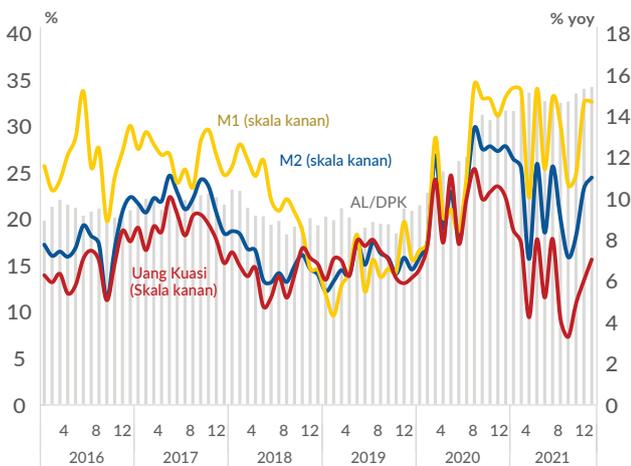


Sumber: BPS, diolah

Inflasi inti pada 2021 tetap rendah. Pada Desember 2021, inflasi inti tercatat sebesar 1,56% (yoy), meningkat dibandingkan dengan inflasi triwulan III 2021 sebesar 1,30% (yoy), namun masih lebih rendah dibandingkan capaian 2020 sebesar 1,60% (yoy). Inflasi inti tetap rendah di tengah permintaan domestik yang mulai meningkat secara gradual, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Kenaikan harga komoditas global yang meningkat juga terindikasi mulai ditransmisikan secara bertahap pada inflasi domestik. Berdasarkan komoditasnya, kenaikan inflasi inti terutama dipengaruhi oleh inflasi komoditas emas perhiasan, sewa rumah, dan kontrak rumah seiring pergerakan harga emas global dan peningkatan mobilitas masyarakat. Sementara itu, ekspektasi inflasi 2021 hasil survei *Consensus Forecast* (CF) pada bulan November 2021 tercatat sebesar 1,60%, lebih rendah dibandingkan angka pada bulan sebelumnya sebesar 1,70%.

Inflasi kelompok VF tetap terjaga seiring pasokan yang memadai. Inflasi kelompok VF pada Desember 2021 tercatat 3,20% (yoy), lebih rendah dari inflasi VF September 2021 sebesar 3,51% (yoy) dan inflasi VF 2020 sebesar 3,62%. Permintaan yang mulai meningkat secara bertahap pada akhir tahun 2021 dapat diimbangi dengan pasokan hortikultura dan bahan pangan lainnya sehingga inflasi VF tetap terjaga. Inflasi VF tersebut terutama dipengaruhi oleh deflasi komoditas bawang merah, telur ayam dan beras seiring terjaganya pasokan, di tengah kenaikan harga minyak goreng yang terus berlanjut seiring

Grafik 2.17. Uang Beredar dan AL/DPK



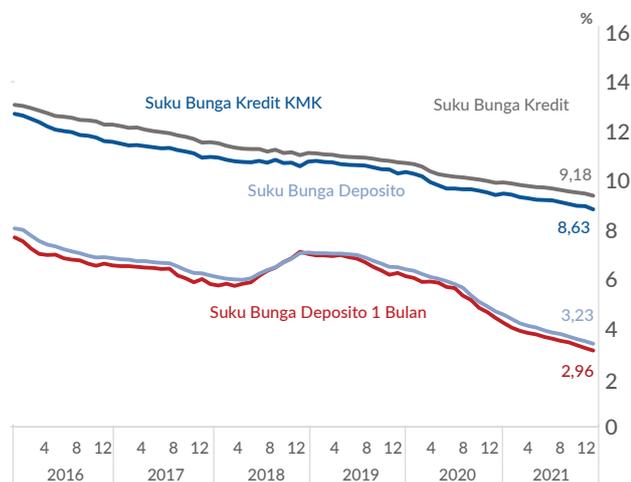
Sumber: Bank Indonesia

kenaikan harga *crude palm oil* (CPO) global. Selain faktor permintaan yang belum kuat, memadainya pasokan tidak terlepas dari berlanjutnya sinergi koordinasi Pemerintah dan Bank Indonesia melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

Kelompok AP mencatat inflasi yang meningkat.

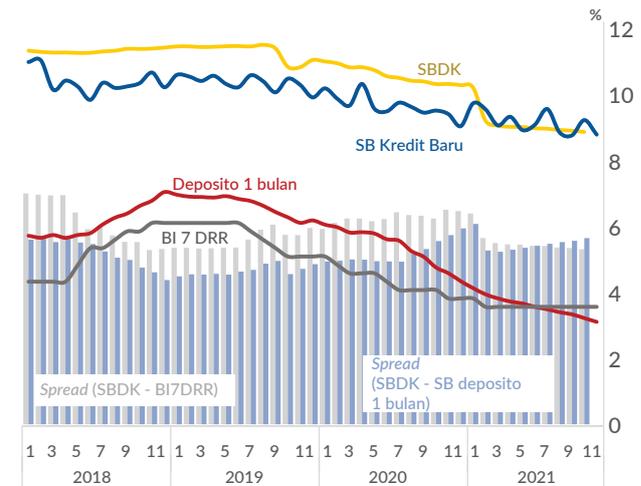
Secara tahunan, kelompok AP pada Desember 2021 mengalami inflasi 1,79% (yoy), lebih tinggi dari inflasi September 2021 sebesar 0,99% (yoy) dan capaian inflasi 2020 sebesar 0,25% (yoy). Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh inflasi angkutan udara seiring membaiknya mobilitas udara pasca pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas dan inflasi rokok kretek filter serta rokok putih sejalan berlanjutnya transmisi kenaikan cukai tembakau ke harga jual rokok.

Grafik 2.18. Suku Bunga Perbankan



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.19. Transmisi BI7DRR kepada SBDK



Sumber: OJK, Bank Indonesia, diolah

Kondisi likuiditas tetap tinggi didorong kebijakan moneter yang akomodatif dan dampak sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

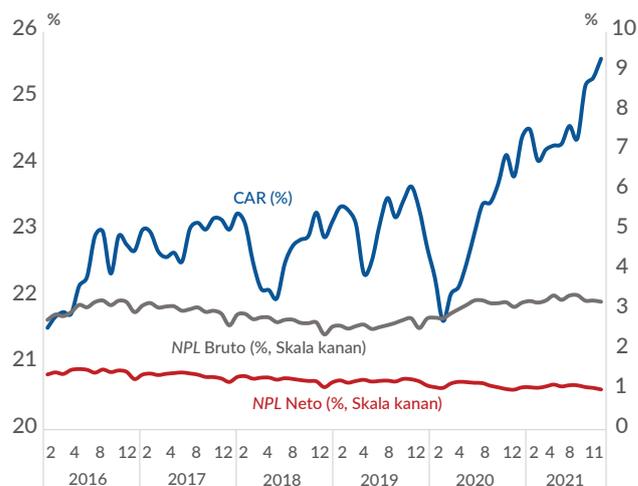
Bank Indonesia telah menambah likuiditas sebesar Rp147,83 triliun pada tahun 2021. Dengan perkembangan tersebut, sejak tahun 2020 kebijakan penambahan likuiditas telah mencapai Rp874,4 triliun atau sekitar 5,3% dari Produk Domestik Bruto, salah satu injeksi likuiditas terbesar di negara berkembang. Sepanjang 2021, Bank Indonesia telah melakukan pembelian SBN untuk pendanaan APBN 2021 sebesar Rp358,32 triliun yang terdiri dari: (i) pembelian di pasar perdana sebesar Rp143,32 triliun sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020 sebagaimana telah diperpanjang tanggal 11 Desember 2020 dan 28 Desember 2021, serta berlaku hingga 31 Desember 2022, dan (ii) *private placement* sebesar Rp215 triliun untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 23 Agustus 2021. Dengan ekspansi moneter tersebut, kondisi likuiditas perbankan pada Desember 2021 longgar, tercermin pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tinggi mencapai 35,12% serta Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 12,21% (yoy). Likuiditas perekonomian meningkat, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh meningkat masing-masing sebesar 17,9%

(yoy) dan 13,9% (yoy). Pertumbuhan uang beredar tersebut terutama didukung oleh kredit perbankan, yang mengindikasikan semakin meningkatnya pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional.

Suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang longgar mendorong suku bunga kredit perbankan dalam tren terus menurun. Di pasar uang dan pasar dana, suku bunga PUAB *overnight* dan suku bunga deposito 1 bulan perbankan telah menurun, masing-masing sebesar 26 bps dan 131 bps sejak Desember 2020 menjadi 2,78% dan 2,96% pada Desember 2021. Di pasar kredit, penurunan SBDK perbankan terus berlanjut, diikuti penurunan suku bunga kredit baru pada seluruh kelompok Bank. Aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang meningkat mendorong perbaikan persepsi risiko perbankan, sehingga berdampak positif bagi penurunan suku bunga kredit baru. Namun demikian, penurunan suku bunga kredit yang jauh lebih lambat daripada penurunan suku bunga deposito perbankan menyebabkan *spread* antara suku bunga kredit dan deposito, cenderung melebar. Oleh sebab itu, Bank Indonesia memandang peran perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan termasuk melalui penurunan suku bunga kredit dapat ditingkatkan guna semakin mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Sejalan dengan terkendalinya penyebaran Covid-19, stabilitas sistem keuangan semakin menguat. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) tetap rendah dan terjaga di zona normal-stabil sepanjang tahun 2021. Ketahanan permodalan bank tetap tinggi tercermin pada rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) sebesar 25,59% pada November 2021, meningkat dibandingkan posisi Oktober 2021 sebesar 25,18% (Grafik 2.21). Rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) tetap rendah dan terjaga pada posisi 3,19% secara bruto atau 0,98% secara neto pada November 2021 menurun dibandingkan posisi Oktober 2021 sebesar 3,22% (bruto) atau 1,04% (neto), seiring ekonomi yang terus mengalami perbaikan, didukung pula dengan perpanjangan implementasi kebijakan restrukturisasi kredit dari OJK.

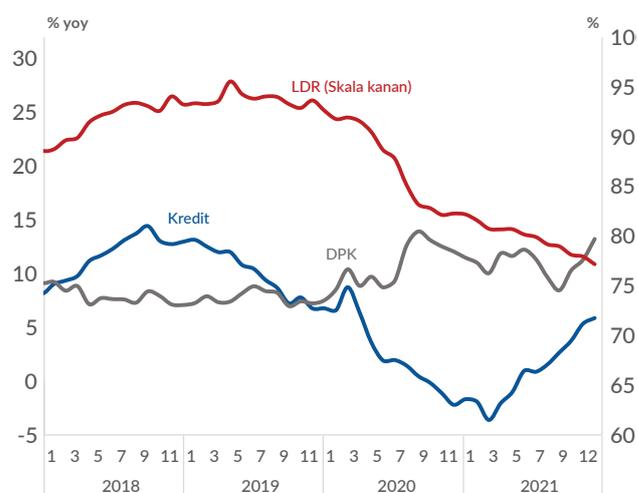
Grafik 2.20. Permodalan Perbankan dan Kualitas Kredit



Sumber: OJK, Bank Indonesia

Pertumbuhan kredit terus melanjutkan peningkatan positif sepanjang tahun 2021. Pada Desember 2021 pertumbuhan kredit tercatat sebesar 5,24% (yoy), seiring dengan perbaikan kondisi permintaan dan penawaran (Grafik 2.22). Permintaan kredit membaik sejalan dengan meningkatnya aktivitas dunia usaha dan konsumsi sebagai dampak melonggarnya aktivitas masyarakat. Seluruh kelompok penggunaan kredit terus mencatat tren pertumbuhan, baik Kredit Investasi, Kredit Konsumsi dan Kredit Modal Kerja. Di sektor konsumsi, Kredit Pemilikan Rumah terus mencatat pertumbuhan tinggi yaitu sebesar 9,13% (yoy) pada Desember 2021, sejalan dengan kebijakan terpadu KSSK untuk mendorong sektor

Grafik 2.21. Kredit dan DPK



Sumber: Bank Indonesia

properti. Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM meningkat pada Desember 2021. Hal ini menunjukkan berlanjutnya perbaikan di sektor riil dan dunia usaha khususnya UMKM.

Kinerja perbankan juga terus mengalami penguatan.

Penguatan dimaksud diantaranya pada aspek efisiensi yang tercermin dari rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional sebesar 82,97% pada November 2021, terus membaik dibandingkan periode Oktober 2021 sebesar 83,14%. Pada aspek profitabilitas, rasio imbal hasil terhadap aset (*Return on Asset*) dan Selisih bunga bersih (*Net Interest Margin*) sebesar 1,91% dan 4,51% masing-masing pada November 2021, relatif stabil terjaga sepanjang semester II 2021.

Searah dengan prospek ekonomi yang semakin baik serta didukung program digitalisasi sistem pembayaran, transaksi sistem pembayaran diperkirakan terus meningkat khususnya transaksi digital. Transaksi *e-commerce* sepanjang tahun 2021 terus meningkat didukung perluasan ekosistem *e-commerce*, terus berlanjutnya pergeseran preferensi

perilaku masyarakat untuk berbelanja daring, maupun berbagai inovasi untuk kemudahan dan kenyamanan berbelanja daring serta berbagai promo tematik oleh para perusahaan serta program-program Pemerintah dan Bank Indonesia. Selama 2021, nilai transaksi uang elektronik (UE) tumbuh 49.06% (yoy) mencapai Rp305,4 triliun dan nilai transaksi *digital banking* meningkat 45,64% (yoy) menjadi Rp39.841,14 triliun. Nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit juga mengalami pertumbuhan 10,70% (yoy) menjadi Rp7.921,70 triliun. Bank Indonesia terus menjaga kelancaran dan keandalan sistem pembayaran serta mendukung program Pemerintah melalui koordinasi dan monitoring uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) 4.0, transaksi keuangan Pemda, dan elektronifikasi moda transportasi. Selain itu, pada tanggal 21 Desember 2021 Bank Indonesia telah meluncurkan BI-FAST sebagai infrastruktur pembayaran ritel yang *real-time* dan beroperasi tanpa henti (24/7). Di sisi tunai, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Desember 2021 meningkat 6,78% (yoy) mencapai Rp959,8 triliun.

2.4

Kinerja Perekonomian Indonesia 2022 Diprakirakan Meningkatkan

Laju perekonomian Indonesia 2022 diprakirakan semakin meningkat didukung perbaikan perekonomian global yang diprakirakan berlanjut pada 2022. Perbaikan ekonomi global yang terus berlangsung tersebut dikonfirmasi oleh kinerja sejumlah indikator pada Desember 2021 antara lain *Purchasing Managers' Index* (PMI), keyakinan konsumen, dan penjualan ritel yang tetap kuat. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi global sekitar 5,7% pada 2021 dan 4,4% pada 2022. Volume perdagangan dan harga komoditas dunia masih meningkat, sehingga menopang prospek ekspor negara berkembang. Ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut sejalan dengan percepatan kebijakan normalisasi the Fed sebagai respons tekanan inflasi di AS yang meningkat sejalan dengan gangguan rantai pasokan dan kenaikan permintaan, serta tingginya penyebaran Covid-19 varian Omicron. Hal tersebut mengakibatkan terbatasnya aliran modal dan tekanan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi nasional diprakirakan bangkit dan meningkat pada 2022, terutama didukung akselerasi konsumsi swasta dan investasi di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor. Hal ini tercermin dari kenaikan indikator hingga Desember 2021 seperti mobilitas masyarakat di berbagai daerah, penjualan eceran, dan keyakinan konsumen. Sumber pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan mulai berimbang, kontribusi permintaan domestik diprakirakan meningkat, meski risiko kenaikan kasus Covid-19 perlu terlu diwaspadai. Prakiraan perbaikan permintaan domestik tercermin pada perkembangan lapangan usaha, sementara PDRB wilayah mulai konvergen. Konsumsi di 2022

diprakirakan membaik seiring pembukaan ekonomi domestik yang didukung vaksinasi yang semakin luas dan mobilitas yang semakin membaik, serta stimulus yang berlanjut. Sementara, perbaikan investasi didukung oleh kembali berlanjutnya PSN, kinerja ekspor yang tetap kuat dan relokasi perusahaan ke dalam negeri. Di sisi eksternal, kinerja ekspor di 2022 diprakirakan tetap positif ditopang pemulihan global (Tabel 2.4).

Prospek kinerja LU pada 2022 diprakirakan terus membaik sejalan dengan pemulihan perekonomian domestik dan kinerja ekspor yang tetap kuat.

Perbaikan tersebut sejalan dengan berlanjutnya kenaikan mobilitas masyarakat seiring dengan percepatan vaksinasi yang mendukung pencapaian *herd immunity* pada 2022, pembukaan sektor-sektor ekonomi secara lebih luas, stimulus kebijakan yang terus berlangsung, dan pemulihan ekonomi global yang semakin baik. Prospek perbaikan kegiatan ekonomi juga didukung oleh kenaikan target penjualan mobil, emiten pakaian, produksi batu bara, CPO, dan sejumlah logam mineral serta proyeksi jumlah penumpang angkutan udara yang mulai meningkat (Tabel 2.5).

Tabel 2.4. Proyeksi Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran

Komponen	2021	2022
Produk Domestik Bruto	3,2 - 4,0	4,7 - 5,5
Konsumsi Swasta	1,5 - 2,3	4,3 - 5,1
Konsumsi Pemerintah	4,6 - 5,4	3,2 - 4,0
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,5 - 4,3	5,3 - 6,1
Ekspor Barang dan Jasa	22,0 - 22,8	6,8 - 7,6
Impor Barang dan Jasa	21,7 - 22,5	6,3 - 7,1

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 2.5. Proyeksi Pertumbuhan PDB Sisi Sektoral

Komponen	2021	2022
Produk Domestik Bruto	3,2 - 4,0	4,7 - 5,5
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,8 - 1,8	3,6 - 4,6
Pertambangan & Penggalian	3,8 - 4,8	2,7 - 3,7
Industri Pengolahan	2,8 - 3,8	3,9 - 4,9
Pengadaan Listrik Dan Gas	3,9 - 4,9	4,0 - 5,0
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,7 - 5,7	5,1 - 6,1
Konstruksi	2,7 - 3,7	3,9 - 4,9
Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor	4,5 - 5,5	4,8 - 5,8
Transportasi Dan Pergudangan	2,5 - 3,5	5,6 - 6,6
Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	4,9 - 5,9	5,0 - 6,0
Informasi Dan Komunikasi	6,5 - 7,5	8,1 - 9,1
Jasa Keuangan Dan Asuransi	2,6 - 3,6	6,1 - 7,1
Real Estat	1,4 - 2,4	2,5 - 3,5
Jasa Perusahaan	1,4 - 2,4	8,2 - 9,2
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,0 - 2,0	0,9 - 1,9
Jasa Pendidikan	-0,2 - 0,8	4,4 - 5,4
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	7,6 - 8,6	6,8 - 7,8
Jasa Lainnya	3,5 - 4,5	6,4 - 7,4

Sumber: Bank Indonesia

Keseimbangan eksternal 2022 diperkirakan terjaga terutama didorong surplus transaksi modal dan finansial yang berpotensi masih dapat membiayai defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan tetap terkendali, berkisar 1,1%-1,9% PDB sepanjang 2022, dipengaruhi oleh ekspor yang tumbuh positif seiring dengan permintaan global yang mulai pulih dan impor yang diperkirakan naik untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkat. Perkembangan defisit transaksi berjalan didukung kinerja neraca perdagangan yang tetap baik. Berbagai upaya ditempuh untuk terus mendorong peningkatan ekspor dan mengurangi ketergantungan impor. Ekspor manufaktur ditingkatkan dengan mendorong implementasi kebijakan pemulihan yang diikuti dengan pembukaan sektor industri prioritas, serta proses digitalisasi 4.0. Peran pariwisata

juga ditingkatkan pada jangka pendek dengan optimalisasi wisatawan nusantara (wisnus), dan pada jangka menengah dengan mengakselerasi pengembangan destinasi super prioritas. Program pemulihan pariwisata fokus pada implementasi protokol kesehatan yang terintegrasi dengan aplikasi peduli lindungi. Proses pemulihan sektor pariwisata diharapkan mengurangi dampak pandemi Covid-19 dan membantu persiapan pada saat wisatawan mancanegara (wisman) kembali berkunjung ke Indonesia.

Prospek aliran modal masuk asing membaik sehingga meningkatkan surplus transaksi modal dan finansial. Surplus transaksi modal dan finansial pada 2022 diperkirakan lebih besar dibanding surplus yang dicapai pada tahun sebelumnya. Di satu sisi, aliran modal masuk tersebut seiring dengan momentum pemulihan global berlanjut dengan risiko divergensi antara negara maju dan negara berkembang yang berkurang. Di sisi lain, aliran modal masuk dipengaruhi oleh prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada pada lintasan pemulihan yang meningkat, daya tarik aset keuangan domestik yang tetap baik, dan premi risiko yang menurun. Berdasarkan jenisnya, aliran investasi langsung juga diperkirakan meningkat seiring perbaikan iklim usaha. Aliran investasi portofolio juga diperkirakan meningkat sejalan dengan kebijakan moneter ekspansif di negara-negara maju yang terus berlanjut sehingga menopang likuiditas global. Sementara itu, aliran investasi lainnya juga diperkirakan meningkat seiring dengan kebutuhan pendanaan infrastruktur yang meningkat dan pertumbuhan ekspor-impor yang membaik. Namun, prospek normalisasi kebijakan moneter global yang lebih cepat berisiko memengaruhi aliran modal ke Indonesia.

Inflasi pada tahun 2022 diperkirakan meningkat namun tetap terkendali dalam sasaran 3±1%. Prakiraan ini sejalan dengan akselerasi pemulihan ekonomi di tengah risiko penyesuaian harga energi, kebijakan perpajakan, dan dampak pembiayaan untuk menunjang proses pemulihan pada tahun-tahun sebelumnya. Inflasi pada tahun 2022 diperkirakan terkendali dalam sasaran 3,0%±1% sejalan dengan masih memadainya penawaran agregat dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat, tetap terkendalinya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta respons kebijakan yang

ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) guna menjaga inflasi IHK dalam kisaran targetnya. Inflasi inti pada tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi seiring dengan naiknya permintaan dan ekspektasi inflasi serta tekanan eksternal yang tinggi meski termoderasi. Inflasi *administered prices* pada tahun 2022 juga diperkirakan lebih tinggi, didorong oleh peningkatan inflasi angkutan seiring normalisasi mobilitas masyarakat, peningkatan inflasi cukai rokok, dan peningkatan inflasi energi seiring membaiknya aktivitas ekonomi. Di sisi lain, inflasi *volatile food* diperkirakan lebih rendah ditopang oleh terjaganya pasokan seiring cuaca yang normal, berkurangnya kendala importasi, dan meredanya kenaikan harga pangan global.

Pada tahun 2022, intermediasi perbankan diperkirakan semakin membaik dengan stabilitas keuangan yang tetap terjaga. Sejalan dengan semakin pulihnya ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19, meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, percepatan realisasi APBN dan APBD oleh Pemerintah, bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang bersinergi dengan Pemerintah dan otoritas terkait, serta kemajuan restrukturisasi kredit oleh perbankan, Bank Indonesia memprakirakan penyaluran kredit oleh perbankan dan pembiayaan oleh pasar modal akan berangsur

meningkat. Pertumbuhan kredit dan DPK pada tahun 2022 diperkirakan meningkat menjadi 6,0-8,0% dan 7,0-9,0% sejalan dengan berangsur pulihnya aktivitas ekonomi dari pandemi Covid-19. Dari sisi penawaran, peningkatan kredit didukung oleh tetap longgarnya likuiditas dan menurunnya persepsi risiko, di samping kebijakan makroprudensial yang akan tetap akomodatif.

Ekonomi keuangan digital nasional diperkirakan meningkat pada tahun 2022 didukung oleh akselerasi digitalisasi sistem pembayaran oleh Bank Indonesia. Transaksi *e-commerce* pada 2022 diproyeksikan akan terus meningkat hingga mencapai Rp526 triliun, atau tumbuh 31%, didukung perluasan ekosistem *e-commerce*, terus berlanjutnya pergeseran preferensi perilaku masyarakat untuk berbelanja *online*, maupun berbagai promosi dan inovasi oleh berbagai perusahaan dan beragam program Pemerintah dan Bank Indonesia. Kenaikan transaksi UE diperkirakan juga berlanjut didorong oleh perluasan penggunaan UE pada *e-commerce* dan pada berbagai platform *online* lainnya. Penggunaan UE diperkirakan tetap tumbuh sekitar 17,1% (yoy) atau mencapai Rp358 triliun pada 2022. Demikian pula, transaksi *digital banking* pada 2022 diproyeksikan akan tetap kuat didukung oleh kenyamanan konsumen bertransaksi secara digital dan berbagai inovasi digital oleh perbankan. Transaksi pembayaran *digital banking* diproyeksikan tumbuh tinggi 24,8% (yoy) hingga mencapai Rp49,7 ribu triliun pada 2022.

2.5

Upaya Mendorong Proses Pemulihan Ekonomi Indonesia

Berdasarkan dinamika yang terjadi pada tahun 2021, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya mendorong proses pemulihan ekonomi Indonesia ke depan. *Pertama*, sinergi untuk akselerasi vaksinasi dan penanganan Covid-19 dengan pembukaan sektor prioritas perlu terus diperkuat untuk semakin mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Akselerasi vaksinasi dan penanganan Covid-19 diperlukan segera agar aktivitas perekonomian dapat berjalan dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan. Sinergi untuk pembukaan sektor prioritas perlu diarahkan kepada sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Sektor-sektor yang menjadi prioritas mencakup sektor yang berkontribusi signifikan terhadap kinerja ekspor sehingga tetap menjaga kemampuan perekonomian dalam menghasilkan valuta asing maupun sektor-sektor yang berperan penting dalam pemenuhan permintaan domestik. Pembukaan sektor prioritas juga perlu mencakup UMKM agar dampak positif dari proses pemulihan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Sinergi juga perlu ditingkatkan untuk sektor yang

mengalami dampak luka memar pada dunia usaha akibat pandemi Covid-19 dan mempunyai risiko stabilitas sistem keuangan relatif tinggi, khususnya sektor pariwisata.

Kedua, diperlukan sinergi untuk penguatan bauran kebijakan ekonomi nasional untuk menjaga stabilitas dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang berlanjut sejalan dengan rencana normalisasi kebijakan moneter the Fed dan sejumlah bank sentral lain, sinergi untuk penguatan bauran kebijakan ekonomi nasional perlu diperkuat untuk tetap menjaga stabilitas di satu sisi dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Gangguan rantai pasok global dan naiknya harga energi akibat kelangkaan menyebabkan peningkatan inflasi di AS dan beberapa negara lainnya. Ketidakpastian mengenai apakah inflasi bersifat persisten atau temporer berdampak pada berlanjutnya ketidakpastian akan normalisasi kebijakan moneter global. Untuk itu perlu dipersiapkan kebijakan yang terukur untuk mengantisipasi rencana normalisasi tersebut.



Mengimbangi kebijakan stabilisasi, pemulihan ekonomi dipercepat melalui sinergi kebijakan untuk mempercepat reformasi struktural di sektor riil, khususnya terkait pembangunan proyek-proyek infrastruktur, implementasi UU Cipta Kerja, keberlanjutan stimulus fiskal yang didukung sebagian pendanaannya dari Bank Indonesia untuk pemulihan ekonomi nasional, serta sinergi KSSK untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha sangat diperlukan untuk meningkatkan laju pemulihan ekonomi nasional.

Ketiga, inovasi dalam sinergi kebijakan ekonomi nasional, akselerasi digitalisasi dan inklusi ekonomi serta keuangan nasional perlu diperkuat. Penguatan akselerasi digitalisasi dilakukan melalui digitalisasi sistem pembayaran untuk menciptakan transaksi sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah,

aman, dan handal. Langkah ini dilengkapi dengan peningkatan inklusi ekonomi serta keuangan nasional melalui program-program pengembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan. Program pengembangan UMKM dilakukan melalui 3 (tiga) pilar kebijakan, yaitu korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan. Pendekatan ini ditujukan untuk mewujudkan UMKM yang produktif, inovatif, dan adaptif. Lebih lanjut, dalam pengembangan ekonomi dan keuangan hijau, diperlukan inovasi kebijakan dan program baik untuk keberlanjutan pembangunan ekonomi nasional maupun untuk menyikapi semakin tingginya tuntutan dari negara-negara maju. Transisi menuju ekonomi hijau, perlu dilakukan secara gradual dan moderat agar kinerja perekonomian tetap terjaga di tengah upaya untuk mencapai target penurunan emisi karbon Indonesia untuk membatasi kenaikan suhu global.